



## **Pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas pad, dan kontribusi bumd serta alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten berau**

**Tamam Rosid<sup>1</sup>, Syarifah Hidayah<sup>2</sup>, Priyagus<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: [tamamrosid77@gmail.com](mailto:tamamrosid77@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengambil objek penelitian di Pemerintahan Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Berau hal ini yang berwenang adalah BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Berau Tahun 2010 s.d.2017. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan Program Eviews. Metode analisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan Program Eviews. yang digunakan adalah data panel dengan menggabungkan antara *cross section* dan *time series*. Model yang digunakan adalah *random effect* melalui pengujian hausman, sementara untuk pengujian secara ekonometrika dilakukan uji asumsi klasik, dan untuk uji hipotesisnya menggunakan uji- t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial, uji-F untuk menguji pengaruh variabel secara serempak, uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) untuk menguji kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah, efektivitas PAD, Kontribusi BUMD Secara langsung berpengaruh positif terhadap belanja modal, Alokasi Belanja Modal secara langsung berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau. Kemandirian Keuangan Daerah, efektivitas PAD, Kontribusi BUMD Secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Kabupaten Berau.

**Kata Kunci:** Kemandirian keuangan daerah, efektivitas pad; kontribusi bumd; alokasi belanja modal; terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten berau

### ***The influence of regional financial independence, pad effectiveness, and the contribution of BUMD as well as the allocation of capital expenditures on the economic growth of Berau district***

#### **Abstract**

*This research takes the object of research in the Berau Regency Government, East Kalimantan. The source of the data used is secondary data in the form of financial statements of the Berau Regency local government, this is the authorized BAPENDA (Regional Revenue Agency) of Berau Regency from 2010 to 2017. The data analysis technique used path analysis with the Eviews Program. The analysis method uses path analysis with the Eviews Program. used is panel data by combining cross section and time series. The model used is a random effect through the Hausman test, while for econometric testing, classical assumption tests are carried out, and to test the hypothesis using t-test to partially test the effect of variables, F-test to test the effect of variables simultaneously, test the coefficient of determination (R<sup>2</sup>) to test the ability of the regression model in explaining the variation of the dependent variable. The results showed that Regional Financial Independence, PAD effectiveness, BUMD Contributions directly had a positive effect on capital expenditures. Capital Expenditure Allocation directly had a positive effect on Economic Growth in Berau Regency. Regional Financial Independence, PAD effectiveness, BUMD Contribution indirectly have a positive effect on Economic Growth through Berau Regency Capital Expenditure.*

**Keywords:** *Regional financial independence, pad effectiveness; bumd contribution; capital expenditure allocation; to the economic growth of berau regency*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD untuk menilai kinerja Pemerintahan Daerah. Sebagaimana menurut James B. Whittaker (1995) dalam *government performance and result act, a mandate for strategic planning and performance measurement* menyatakan bahwa pengukuran/ penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Terdapat unsur akuntabilitas dalam *good governance* yang baik, dimana pemerintah diharapkan dapat melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai. Beberapa rasio yang dapat digunakan diantaranya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio kontribusi BUMD.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007: 233).

Efektivitas PAD dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya

pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peranan serta kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya.

Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD/ BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim.

Pada sisi penerimaan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada sistem pengelolaan dan pengawasan sehingga pada realisasinya pendapatan asli daerah belum tercapai sesuai dengan yang telah di targetkan.

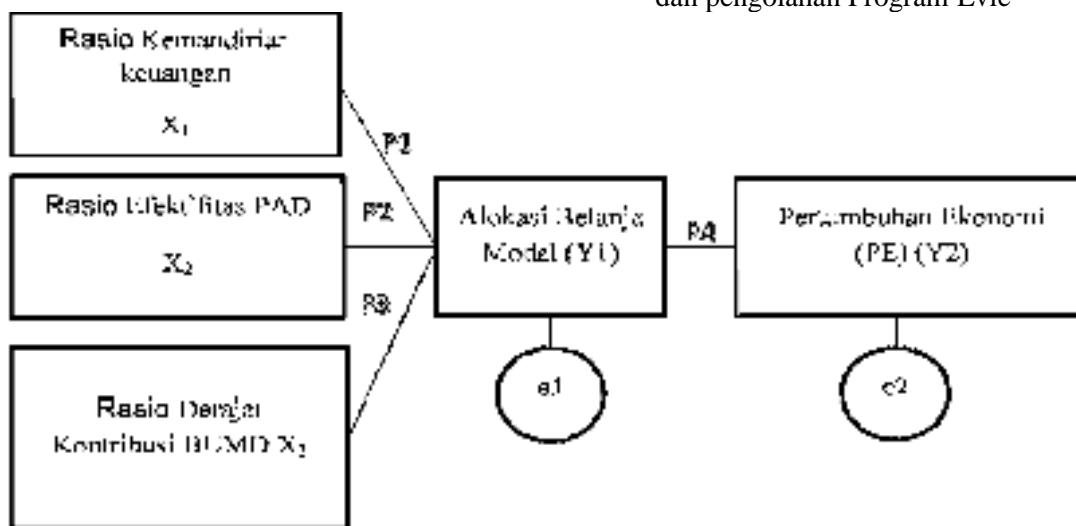
Sedangkan suatu daerah otonomi diharapkan mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya karena itu kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah.

## METODE

Kinerja keuanagan yang digunakan dalam penelitian ini berupa kemandirian, efektifitas, kontribusi BUMD. Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah baik akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan daerah. Sehingga

meningkatkan proporsi belanja modal pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alokasi belanja modal yang memadai akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja modal untuk melakukan investasi daerah. Hal ini dilakukan jika porsi untuk belanja yang lain tidak begitu besar dan menghabiskan anggaran. Kinerja keuangan yang baik, diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat yang digunakan untuk memprediksi kontribusi anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah Kabupaten Berau pada Tahun 2010 s/d 2017. Penelitian menguji pengaruh langsung komponen kinerja keuangan terhadap belanja modal, pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh tidak langsung komponen kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis jalur dan pengolahan Program Evie



GAMBAR 2.1  
Model Kerangka Pemikiran

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + s_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_4 Y_1 + s_1 \dots \dots \dots (2)$$

### Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah ( $X_1$ ) secara langsung berpengaruh Negatif terhadap Alokasi Belanja Modal ( $Y_1$ ) Kabupaten Berau.
2. Rasio Efektifitas PAD ( $X_2$ ) secara langsung berpengaruh Negatif terhadap Alokasi Belanja Modal ( $Y_1$ ) Kabupaten Berau.
3. Rasio Kontribusi BUMD ( $X_3$ ) secara langsung berpengaruh Negatif terhadap Alokasi Belanja Modal ( $Y_1$ ) Kabupaten Berau.
4. Belanja modal ( $Y_1$ ) secara langsung berpengaruh Positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) Kabupaten Berau.
5. Rasio Kemandirian keuangan Daerah ( $X_1$ ) secara tidak langsung berpengaruh Negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) Kabupaten Berau.
6. Rasio Efektifitas PAD ( $X_2$ ) secara tidak langsung berpengaruh Negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) Kabupaten Berau.
7. Rasio Kontribusi BUMD ( $X_3$ ) secara tidak langsung berpengaruh Negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) Kabupaten Berau.

### Teknik Analisis Data.

Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan alat uji statistik Eviews. Data dalam penelitian ini menggunakan data runtun waktu (*time series*). Data runtun waktu biasanya meliputi satu objek (misalnya harga saham, kurs mata uang, atau tingkat inflasi), tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, tahunan,

dan sebagainya). Dalam pembahasan teknik estimasi model regresi data panel, ada tiga teknik yang dapat digunakan, yaitu:

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi - variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009 : 87). Total variasi yang dapat dijelaskan oleh semua variabel yang dilibatkan dalam model diukur dengan :

$$R^2 = 1 - \frac{e^2}{\bar{e}^2}$$

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dimana jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan Program Eviews, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikan masing - masing variabel bebas dengan  $\alpha = 0,05$ .

### Path Analysis

Pola pengaruh antar variabel yang diteliti merupakan pengaruh sebab akibat dari satu atau beberapa variabel independen

kepada satu atau beberapa variabel dependen. Bentuk pengaruh sebab akibat dalam penelitian ini menggunakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda, sebagai variabel independen pada suatu kasus, namun menjadi variabel dependen pada kasus lain. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung, seperangkat variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*). Model analisis jalur merupakan pola hubungan sebab akibat atau *a set of hypothesized causal asymmetric relation among the variable*, Ridwan dan Engkos (2007).

**Asumsi – Asumsi Analisis Jalur** Beberapa asumsi yang mendasari analisis jalur (*path analysis*) menurut Ridwan dan Engkos (2007) adalah sebagai berikut :

Hubungan antar variabel adalah bersifat linier, adaptif, dan bersifat normal. Hanya sistem aliran kausal kesatu arah artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik.

Variabel terikat (*endogen*) minimal dalam skala ukur interval atau ratio.

Menggunakan data yang bersifat *standardized*, yaitu data dimana data mentah dibagi dengan standar deviasi dari masing - masing data.

*Observed variable* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel), artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung.

Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori - teori dan konsep - konsep yang relevan artinya model teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau. Deskripsi Data ini digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan mencakup variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*).

### Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Min	Maks	Rata-Rata	St. Deviasi
X1	9.0643	125.3787	26.9855	39.8716
X2	96.8228	137.4891	112.5244	15.7295
X3	0.3780	1.7456	1.2182	0.4140
Y1	51749.04007.03	12978.24318.380	78224.34730.90	26215.70592.67
Y2	-17873.51657.669410	52200.98721.3930	-21423.80856.40196	63646.75946.56935

Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa dari tahun 2010 – 2017 nilai kemandirian keuangan daerah Kabupaten Berau memiliki nilai terendah sebesar 9.0643, sedangkan untuk nilai tertinggi kemandirian keuangan daerah sebesar 125.3787. Kemudian rata-rata kemandirian keuangan daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 sebesar 26.9855. Nilai Standard deviasi sebesar 39.8716 nilai tersebut lebih besar dari rata-ratanya sehingga dapat dinyatakan bahwa keragaman data kemandirian keuangan daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 cenderung besar.

Sementara itu nilai terendah efektifitas PAD sebesar 96.8228, sedangkan untuk nilai tertinggi efektifitas PAD sebesar 137.4891. Kemudian rata-rata efektifitas PAD pada Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 sebesar 112.5244. Nilai Standard deviasi yang dihasilkan sebesar 15.7295 nilai tersebut lebih kecil dari rata-ratanya sehingga dapat dinyatakan keragaman data efektifitas PAD daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 cenderung kecil.

Nilai terendah derajat kontribusi BUMD sebesar 0.3780, sedangkan untuk nilai tertinggi derajat kontribusi BUMD sebesar 1.7456. Kemudian rata-rata derajat kontribusi BUMD daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 sebesar 1.2182. Nilai Standard deviasi yang dihasilkan sebesar 0.4140 nilai tersebut lebih kecil dari rata-ratanya sehingga dapat dinyatakan keragaman data derajat kontribusi BUMD Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 cenderung kecil.

Berikutnya nilai terendah Alokasi Belanja Modal sebesar 51749.04007.03 sedangkan untuk nilai tertinggi Alokasi Belanja Modal sebesar 12978.24318.380.

Kemudian rata-rata Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 sebesar 78224.34730.90. Nilai Standard deviasi yang dihasilkan sebesar 26215.70592.67 nilai tersebut lebih kecil dari rata-ratanya sehingga dapat dinyatakan keragaman data Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 cenderung kecil.

Nilai terendah pertumbuhan ekonomi daerah sebesar -17873.51657.669410 sedangkan untuk nilai tertinggi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 52200.98721.3930. Kemudian rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 sebesar -21423.80856.40196. Standard deviasi sebesar 63646.75946.56935 nilai tersebut lebih besar dari rata-ratanya sehingga dapat dinyatakan keragaman data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2017 cenderung besar.

### **Pengujian Asumsi Klasik**

Untuk menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimation) pada suatu model maka semua asumsi klasik harus terpenuhi. Pengujian asumsi klasik meliputi uji asumsi multikolinieritas, normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berikut adalah hasil pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi :

### **Asumsi Multikolinieritas**

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi tidak diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen.

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF masing-masing variabel independen.

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dinyatakan tidak terdapat gejala

multikolinier Adapun ringkasan hasil pengujian multikolinieritas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.7. Tabel Collinearity Statistics – Pengujian Multikolinieritas

Variabel Independen	VIF
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	3.514210
Rasio Efektifitas PAD	1.251304
Rasio Derajat Kontribusi BUMD	3.172426
Alokasi Belanja Modal	1.000000

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk semua variabel independent (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Derajat Rasio Kontribusi BUMD, dan Alokasi Belanja Modal) menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

**Asumsi Normalitas**

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis path diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui *normality test*.

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai probabilitas dari *normality test* > *significant alpha* 5% atau 0,05 maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil *normality t*

Tabel 5.8. *Kolmogorov Smirnov* – Pengujian Normalitas

Model	Statistic	Probabilitas
Y1	5.462189	0.065148
Y2	2.828441	0.243115

Sumber: Diolah dari hasil Eviews

Berdasarkan Pengujian asumsi normalitas menghasilkan probabilitas statistik uji lebih besar dari nilai *significant alpha* 5% atau 0,05. Hal ini berarti residual pada model Alokasi Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

**Asumsi Heteroskedastisitas**

Pengujian asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pada

analisis regresi linier diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui *Glejser Test*. Hipotesis pengujian asumsi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

H0 : Residual memiliki ragam homogen  
H1 : Residual tidak memiliki ragam homogen

Kriteria pengujian menyatakan apabila probabilitas yang dihasilkan dari pengujian *Glejser*  $\geq$  level of significant ( $\alpha=5\%$ ) maka residual dinyatakan memiliki

ragam yang homogen. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi

heteroskedastisitas melalui *Glejser Test*:

Tabel 5.9. Glejser Test – Pengujian Heteroskedastisitas

Model	Glejser Test	Probabilitas
Y1	4.491473	0.2131
Y2	0.820159	0.3651

Pengujian asumsi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari *level of significant* ( $\alpha=5\%$  atau 0.05). Hal ini berarti residual pada model Alokasi Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

**Asumsi Autokorelasi**

Pengujian asumsi auto korelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah observasi/ series residual saling berkorelasi atau tidak. Pengujian asumsi autokorelasi

diharapkan observasi residual tidak saling berkorelasi. Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan menggunakan *Breusch - Godfrey Serial Correlation LM Test* : Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai probabilitas *chi square* > *significant alpha* 5% atau 0,05 maka persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi atau residual tidak saling berkorelasi atau berhubungan. Hasil pengujian autokorelasi ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Test Statistics	Probabilitas
Y1	0.339850	0.5599
Y2	0.243513	0.6217

Berdasarkan ringkasan pada tabel di atas didapatkan nilai probabilitas *chi square* > *significant alpha* 5% atau 0,05. Dengan demikian residual yang dihasilkan dari persamaan Alokasi Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi yang telah diestimasi dinyatakan Tidak ada autokorelasi.

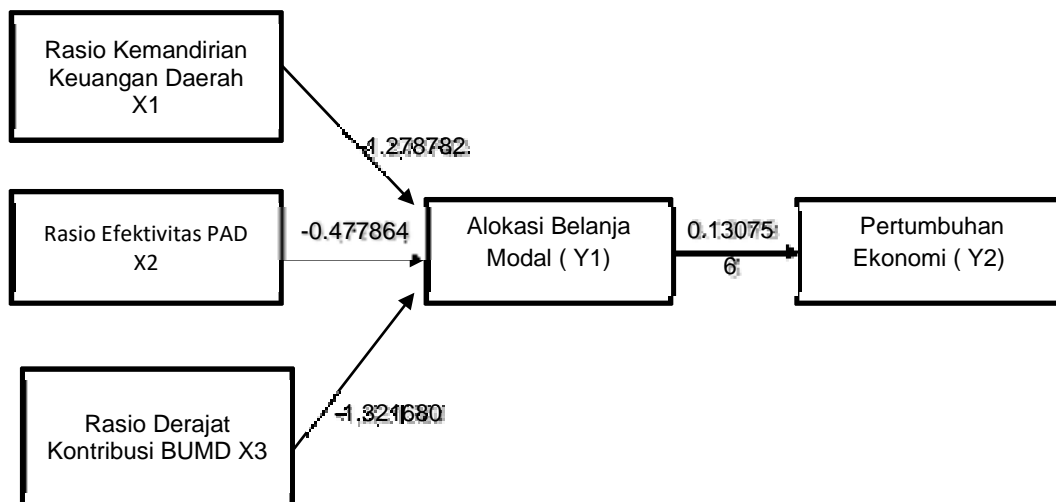
**Pengujian Hipotesis**

Hasil pengujian pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD secara langsung terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dapat dilihat melalui tabel berikut,

Tabel 5.11 Hasil Pengujian Signifikansi secara langsung

Pengaruh	Koefisien	t-Statistic	Nilai Signifikansi
X1 □ Y1	-1.278782	-2.465278	0.0693
X2 □ Y1	-0.477864	-1.543852	0.1975
X3 □ Y1	-1.321680	-2.681722	0.0551
Y1 □ Y2	0.130756	0.323060	0.7576





$$Y_1 = -1.278782 + -0.477864 + -1.321680 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = 0.130756 \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan hasil uji Signifikan seperti Tabel 5.11, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Kemandirian Keuangan mempunyai koefisien beta sebesar -1.278782 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0693 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Kemandirian Keuangan Daerah Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau
- 2). Efektifitas PAD mempunyai koefisien beta sebesar - 0.477864 dengan nilai signifikansi sebesar 0.1975 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Efektifitas PAD Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau
- 3). Derajat Kontribusi BUMD mempunyai koefisien beta sebesar - 1.321680 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0551 yang lebih kecil dari 0,05. terhadap alokasi belanja modal. Hal ini berarti Derajat Kontribusi BUMD, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

- 4). Alokasi Belanja Modal mempunyai koefisien beta sebesar 0.130756 dengan nilai signifikansi sebesar 0.7576 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi Pertumbuhan Ekonomi.

#### **Pengujian Signifikansi Secara Langsung**

Pengujian signifikansi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari rasio kemandirian keuangan daerah terhadap Alokasi Belanja Modal, rasio efektifitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal, rasio derajat kontribusi BUMD secara langsung terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau. Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas < *level of significance* ( $\alpha$ ) maka terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.11 dapat dijelaskan mengenai pengujian hipotesis dari masing - masing variabel bebas yaitu sebagai berikut:

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau**

Hipotesis EPS yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ho : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Ha : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Berdasarkan Hasil penelitian diperoleh hasil estimasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0693. Nilai signifikansi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 0,0693 dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $0,0693 > 0,05$ ). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima Ho yang artinya secara statistik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $\alpha = 0,05$ ).

### **Rasio Efektifitas PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau**

Hipotesis Rasio Efektifitas PAD yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ho : Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Ha : Rasio Efektifitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi

Belanja Modal Kabupaten Berau

Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh hasil estimasi Rasio Efektifitas PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0.1975. Nilai signifikansi Rasio Efektifitas PAD 0.1975 dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Rasio

Efektifitas PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $0.1975 > 0,05$ ). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima Ho yang artinya secara statistik Efektifitas PAD tidak mempengaruhi Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $\alpha = 0,05$ ).

### **Rasio Derajat Kontribusi BUMD Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau**

Hipotesis Rasio Derajat Kontribusi BUMD yang diajukan adalah sebagai berikut :

Ho : Rasio Derajat Kontribusi BUMD, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Ha : Rasio Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh hasil estimasi variabel Rasio Derajat Kontribusi BUMD memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0551. Nilai signifikansi Rasio Derajat Kontribusi BUMD 0.0551 dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Rasio Derajat Kontribusi BUMD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $0.0551 > 0,05$ ). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima Ho yang artinya secara statistik Rasio Derajat Kontribusi BUMD, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $\alpha = 0,05$ ).

### **Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau**

Hipotesis Alokasi Belanja Modal yang diajukan adalah sebagai berikut :

Ho : Alokasi Belanja Modal, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau  
 Ha : Alokasi Belanja Modal, berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau

Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh hasil estimasi variabel Alokasi Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0.7576. Nilai signifikansi Alokasi Belanja Modal 0.7576 dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Alokasi Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau ( $0.7576 > 0,05$ ). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menolak Ho yang artinya secara statistik Alokasi Belanja Modal, tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau ( $\alpha = 0,05$ ).

#### Uji Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian signifikansi tidak langsung digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio derajat kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau. Kriteria pengujian menyatakan jika nilai t statistics  $> t$  tabel = 2,90 maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian hipotesis pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12 Hasil Pengujian Signifikansi Tidak Langsung

Pengaruh	a x b	S <sub>a x b</sub>	t-Statistic
X1 □ Y1 □ Y2	-0.167	0.522	-0.320
X2 □ Y1 □ Y2	-0.062	0.207	-0.302
X3 □ Y1 □ Y2	-0.173	0.539	-0.321

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.12 dapat dijelaskan mengenai pengujian hipotesis dari masing - masing variabel bebas yaitu sebagai berikut :

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Hipotesis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang diajukan adalah sebagai berikut :

Ho : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Ha : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh hasil estimasi variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki nilai t statistics sebesar -0,320. Nilai t statistics Rasio Kemandirian Keuangan Daerah - 0,320 dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $- 0,320 < 2,90$ ). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima Ho yang artinya secara statistik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $\alpha = 0,05$ ).

#### Rasio Efektifitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Hipotesis Efektifitas PAD yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ho : Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Ha : Rasio Efektifitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh hasil estimasi variabel Rasio Efektifitas PAD memiliki nilai t statistics sebesar -0,302. Nilai t statistics Efektifitas PAD -0,302 dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $-0,302 < 2,90$ ). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima Ho yang artinya secara statistik Rasio Efektifitas PAD tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $\alpha = 0,05$ ).

#### Rasio Derajat Kontribusi BUMD Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Hipotesis Rasio Derajat Kontribusi BUMD yang diajukan adalah sebagai berikut :

Ho : Rasio Derajat Kontribusi BUMD, tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Ha : Rasio Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau

Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh hasil estimasi variabel Rasio Derajat Kontribusi BUMD memiliki nilai t statistics sebesar -0,321. Nilai t statistics Rasio Derajat Kontribusi BUMD -0,321 dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Rasio Derajat Kontribusi BUMD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $-0,321 < 2,90$ ). Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima Ho yang artinya secara statistik Rasio Derajat Kontribusi BUMD, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau ( $\alpha = 0,05$ ).

#### Pengujian Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi pengaruh Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektifitas PAD, dan Rasio derajat kontribusi BUMD secara langsung terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dapat diketahui melalui koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Berikut adalah hasil kontribusi pengaruh melalui koefisien determinasinya ( $R^2$ ) :

Tabel 5.13 Hasil Koefisien Determinasi

Variabel Dependen	R Squared
Alokasi Belanja Modal ( $R^2_{Y1}$ )	0.693738
Pertumbuhan Ekonomi ( $R^2_{Y2}$ )	0.017097
<b>Total = 1- ((1-<math>R^2_{Y1}</math>) × (1-<math>R^2_{Y2}</math>))</b>	<b>0.698974</b>

Berdasarkan tabel 5.13 diketahui bahwa hasil koefisien determinasi total

yaitu sebesar 0.698974 atau sebesar 69,8974%. Hal ini berarti kontribusi rasio

kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD secara langsung terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau sebesar 69,8974%, sedangkan sisanya sebesar 30.1026% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasinya**

Setelah dilakukan pengujian hipotesis dan estimasi pada model rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, dan rasio derajat kontribusi BUMD secara langsung terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau. Di bawah ini merupakan hasil analisa dan pengujian hipotesis.

#### **Analisa Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Secara Langsung Berpengaruh Negatif Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten Berau Secara Langsung Berpengaruh Negatif Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0693 dan nilai koefisiennya sebesar - 1,278782. Hal ini berarti hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini ditolak. Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Dari nilai koefisien yang negatif dan tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Berau tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap

Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau.. Dengan hasil yang demikian menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah Kabupaten Berau kurang mampu membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri. Artinya bahwa pemerintah daerah masih tergantung dari pemerintah pusat dan atau provinsi dalam pembelajaran daerahnya.

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki fleksibilitas untuk menggunakan dana, karena penerimaan dana dari pemerintah pusat dan/atau provinsi telah jelas peruntukannya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Berau yang tidak signifikan menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah kemungkinan tidak di alokasikan untuk belanja modal tetapi untuk lainnya seperti belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan.

Hasil pada penelitian ini mendukung temuan dari Arsa dan Setiana (2015) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan, sesuai dengan hasil analisis tidak berpengaruh secara signifikan pada alokasi belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Nabila (2017) yang mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal

#### **Analisa Pengaruh Rasio Efektifitas PAD Berpengaruh Negatif Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Rasio Efektifitas PAD Berpengaruh negatif Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dapat dilihat bahwa nilai koefisiennya sebesar - 0.477864 nilai signifikansi sebesar 0,1975

. Hal ini penelitian kedua Nilai koefisien yang negatif dan tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa Rasio Efektifitas PAD tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau. Rasio Efektifitas PAD yang tidak signifikan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau, menurut Indiyanti dan Rahyuda (2018), dapat disebabkan oleh kecenderungan diabaikannya pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga pengalokasian belanja modal tidak terealisasi secara maksimal. Pencapaian PAD yang lebih besar dari targetnya, seharusnya dapat meningkatkan pengalokasian pada belanja modal, namun pemerintah kabupaten Berau lebih banyak menggunakan pendapatan asli daerah tersebut untuk memenuhi belanja pegawai. Menunjukkan tingkat Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan belum mampu menentukan dalam alokasi belanja modal, memungkinkan semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin tinggi juga peluang untuk alokasi belanja modalnya, prakteknya pemerintah kabupaten Berau belum bisa mencapai target yang di harapkan. Hal ini mendukung temuan dari Indiyanti dan Rahyuda (2018) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap besar kecilnya alokasi belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Arsa dan Setiawina (2017) yang mengungkapkan bahwa efektifitas PAD berpengaruh positif pada belanja modal.

### **Pengaruh Rasio Derajat Kontribusi BUMD Secara Langsung Berpengaruh Negatif Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Derajat Kontribusi BUMD Secara Langsung Berpengaruh negatif Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau dapat dilihat bahwa nilai nilai koefisiennya sebesar -1.321680 dan signifikansi sebesar 0,0551 . Nilai koefisien yang negatif dan tidak signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) tersebut menunjukkan bahwa Rasio Derajat Kontribusi BUMD tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Berau. Kontribusi BUMD merupakan salah satu sumber dari PAD pemerintah daerah, secara teori semakin tinggi kontribusi BUMD yang diterima, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal yang semakin meningkat pula. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari BUMD tidak begitu signifikan terhadap alokasi modal. Hal ini lebih disebabkan, kondisi dari sebagian besar perusahaan daerah masih belum mampu memberikan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan untuk penyertaan kepada perusahaan daerah belum mampu memberikan kontribusi yang diharapkan dalam PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Asha Florida (2007) bahwa secara parsial hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan. penelitian yang telah dilakukan Arsa dan Setiawina (2015) yang menyatakan bahwa Rasio kontribusi BUMD, sesuai dengan hasil analisis, tidak berpengaruh secara signifikan pada alokasi belanja modal. Namun berbeda dengan hasil penelitian Indiyanti dan Rahyuda (2018) yang menyimpulkan bahwa rasio derajat kontribusi BUMD memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap besar kecilnya alokasi belanja modal.

Menurut Martini dan Dwinandra (2015), Rasio kontribusi BUMD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal ini terjadi kemungkinan disebabkan karena penerimaan laba BUMD dari tahun ke tahun relatif masih kecil, sehingga kurang mampu membantu dalam pengalokasian belanja modal

**Analisa Pengaruh Belanja Modal Secara Langsung Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio alokasi Belanja Modal Secara Langsung Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau dapat dilihat bahwa nilai koefisiennya sebesar 0,130756. Dan nilai signifikansi sebesar 0,7576 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti penelitian keempat yang dikembangkan dalam penelitian ini di terima. Alokasi Belanja Modal Berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau. Nilai koefisien yang positif dan tidak signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Adi (2007) yang menyatakan bahwa belanja modal pembangunan daerah sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Dewi dan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Sularso dan

Restianto (2011) yang menemukan alokasi belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Fitriyanti dan Pratolo (2009) yang menemukan bahwa

belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Hal ini disebabkan karena belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif, selain itu dapat juga disebabkan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek/ pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

**Analisa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Secara Tidak Langsung Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Kabupaten Berau**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah Secara Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Kabupaten Berau dapat dilihat bahwa nilai koefisiennya sebesar -

0.167. Nilai koefisien yang negatif dan tidak signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) nilai t statistics sebesar - 0.320 nilai tersebut menunjukkan bahwa

rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Kabupaten Berau. Hal ini disebabkan karena rasio kemandirian keuangan daerah kemungkinan tidak di alokasikan untuk belanja modal, demikian juga dengan belanja modal yang digunakan pemerintah daerah kemungkinan dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif atau pembangunan infrastruktur masih berjalan

sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut. Penelitian mendukung temuan dari Arsa dan Setiawina (2015) yang menyatakan bahwa

kemandirian keuangan, sesuai dengan hasil analisis, secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal.

### **Analisa Rasio Efektifitas PAD Secara Tidak Langsung Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Kabupaten Berau**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio Efektifitas PAD Secara Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Kabupaten Berau dapat dilihat bahwa nilai koefisiennya sebesar -0.062. Nilai koefisien yang negatif dan tidak signifikan ( $\alpha = 0,05$ ), nilai t statistics sebesar -0.302 dan tersebut menunjukkan bahwa rasio Efektifitas PAD tidak mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Kabupaten Berau.

Efektivitas PAD merupakan salah satu komponen dari kinerja keuangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengalokasian belanja modal. Dengan semakin efektifnya PAD, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu pemerintah daerah. Namun hal ini berbalik pemerintah kabupaten Berau belum mampu mengefektifkan anggaran dengan memfungsikan kembali aset-aset yang selama belum terkelolah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan dari Suwandi dan Tahar (2015) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD dengan dimediasi oleh belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki tingkat efektifitas PAD yang tinggi tidak selalu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tinggi juga dikarenakan tidak diimbangi dengan alokasi belanja modal yang tinggi juga untuk masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

### **Analisa Rasio Derajat Kontribusi BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Secara Tidak Langsung Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Kabupaten Berau**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Kontribusi BUMD Pemerintah Daerah Secara Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Kabupaten Berau dapat dilihat bahwa nilai koefisiennya sebesar -0.173. Nilai koefisien yang negatif dan tidak signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) nilai t statistics sebesar -0.321 dan nilai tersebut menunjukkan bahwa rasio Derajat Kontribusi BUMD tidak mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Kabupaten Berau.

Kondisi yang sama seperti analisis pengaruh langsung Kontribusi BUMD terhadap belanja modal, maka dengan rendahnya kontribusi tersebut, maka variabel kontribusi BUMD tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini lebih disebabkan, kondisi dari sebagian besar perusahaan daerah masih belum mampu memberikan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan untuk penyertaan kepada perusahaan daerah belum mampu memberikan kontribusi yang diharapkan dalam PAD. Hasil penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan dari Arsa dan Setiawina (2015) yang menyatakan bahwa kontribusi BUMD, sesuai dengan hasil analisis secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal. Hal ini dapat disebabkan karena penggalan potensi - potensi penerimaan asli daerah melalui perusahaan daerah (BUMD) tampaknya masih belum optimal dan tepat sasaran



dikarenakan penggunaan PAD untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur baik pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana masih belum maksimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang telah diuraikan menghasilkan kesimpulan sebelumnya diperoleh hasil bahwa kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD dan kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal dan berpengaruh negatif pada belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan ditentukan oleh alokasi belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten Berau, dan semakin tinggi alokasi biaya modal yang dikeluarkan, maka dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dari tiga indikator kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini, tiga indikator kinerja keuangan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Ketiga indikator tersebut adalah Kemandirian keuangan Daerah, efektivitas PAD, Kontribusi BUMD secara baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal dan Alokasi Belanja Modal, berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau.

### Saran

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 s.d. 2017,

tanpa dilakukan konfirmasi dalam bentuk observasi langsung, wawancara dan penggunaan daftar pertanyaan berupa kuesioner untuk mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian kinerja yang baik. Penelitian ini juga baru menggunakan 4 rasio kinerja keuangan yaitu: kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, kontribusi BUMD dan alokasi belanja modal yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten Berau.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah kabupaten Berau, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi belanja, rasio likuiditas, dan solvabilitas, sehingga hasil penelitian lebih representatif

### DAFTAR PUSTAKA

- Hafidh, Aula Ahmad. 2013. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 8 (2):109 -120
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah edisi 2*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (JIMFEB)*, 1 (2) :1- 21.
- Huda, Ahmad Syahril. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan, *Fiscal Stress*, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. *ASSETS*, 5 (2) :1 - 12.
- Jatitmas, Rilo. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11 (1) : 50 - 57.
- Jin, Tao and Jianhui Zhang. 2011. Effect of Local Government Expenditure on The Ratio of Output to Capital : Evidence From Panel Data at China's Provincial Level. *Frot. Econ. China*, 6 (2) : 249 - 270.
- Kayode, Ayinde, John Kuranga, and Adewale F. Lukman. 2015. Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue And Economic Growth: Co - Integration, Error Correction Mechanism And Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, 5 (6) : 858 - 867.
- Mahmudi.2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Adi, P. H. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- .2007. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol 08. No. 1.
- Alexiou Constantinous. 2009. Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE). *Journal of Economic and Social Research*. Vol 11. No. p. 1-16.
- Asha Florida, 2007, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- BPKP, 2012. *Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Revisi)*.
- BPS, 2014, *PDRB Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2009 - 2013*.
- Browne, M.W. dan Cudeck, R. 1993. *Alternative ways of as essing model fit*. Dalam K.A Bollen dan J.S. Long (Eds.) Testing structural equation model. Newbury park, CA : Sage.
- Byrne, B.M. 1998. *Issues and opinion on structural equation modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS : Basic concepts, applications and programming*. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Darwanto dan Yulia Yurikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dan

- Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X 26 - 28 Juli*. Makasar.
- Diamantopaulus, A. dan Siguaw, J.A. 2000. *Introducing LISREL: A guide for the uninitiated*. Sage Publications.
- Efron, B. & R. J. Tibshirani. 1993. *An Introduction to the Bootstrap*. New York : Chapman and Hall
- Ferdinand. A. 2002. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen. Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis S - 2 dan Disertasi S -3*. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Fitriyanti dan Pratolo. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. *Proceeding Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik*. Jakarta.
- Ghozali, Iman. 2008. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16.0*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. *Structural Equation Modeling : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.80*. edisi 3. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometrics. Third Edition*. McGraw Hill International Editions
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan kuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 No. 1 : 53 - 64.
- \_\_\_\_\_. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 2. Hal. 17 - 32.
- Hamzah, A. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur*. Universitas Trunojono.
- Hanafi, Imam dan Nugroho, T. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah : Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Malang : UB Press.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W, Jaya, W.K, Purwanto, B.M, Halim, A, Suprianto, J, Purnomo, A.B, 1994, Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta
- Kawedar, Warsito, dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Lin, J. Y, dan Liu, Z. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth ni China, *Economic Development and Cultural*

- Change*. Chicago. Vol 49.
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Nuarisa, Sheila A. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1 No. 3 : 89 - 95.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purbadharmaja. 2006. Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol . 11 No. 1. Hal. 79 - 91.
- Rahayu Tri. 2004. Peranan Sektor Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta. *Jurnal Kinerja*. Vol. VIII. Hal. 133 - 147.
- Ramayandi Arief. 2003. Economic Growth and Government Size In Indonesia : Some Lessons for The Local Authorities. *Working Paper in Economics and Development Studies*. No. 200302. Padjadjaran University
- Ridwan, Kuncoro Engkos Achmad. 2007. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Samuelson, P.A, dan Nordhaus, W, D. 2004. *Ilmu Makroekonomi*. Edisi XVII. alih bahasa Gretta dkk. Jakarta : PT Media Global Edukasi. Saragih,
- J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Setiaji, Wirawan, dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran (studi pada kabupaten dan kota se Jawa Bali), *Simposium Nasional Akuntansi*, Juli 26 -28, Makassar
- Sodik Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12 No. 1. Hal. 27 - 36.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Edisi II. Jakarta : Kencana.
- Sularso, H, dan Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. Vol. 1 No. 2 : 109 - 124.
- Sulistiyowati, D. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suryarini Trisni (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2 No. 1. Hal. 207 - 216.
- Tambunan Tulus T.H. 2011. *Perekonomian Indonesia*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Todayo, Michael P. and Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan*

- Ekonomi*. Edisi 8. alih bahasa Haris Munandar. Jakarta : Erlangga.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 1. No. 2 Juli. Hal 142 – 155.
- Wandira, Arbie G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1 No. 3: 45 - 51.
- Wibowo Puji. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5 No.1. Hal. 55 - 83.
- Widayat dan Amirullah. 2002. *Riset Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wong, J. D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall, 16.3.
- Yuliarmi, Nyoman. 2008. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali. *Bulletin Studi Ekonomi*. Vo.13 No. 2. Universitas Udayana Denpasar.